

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

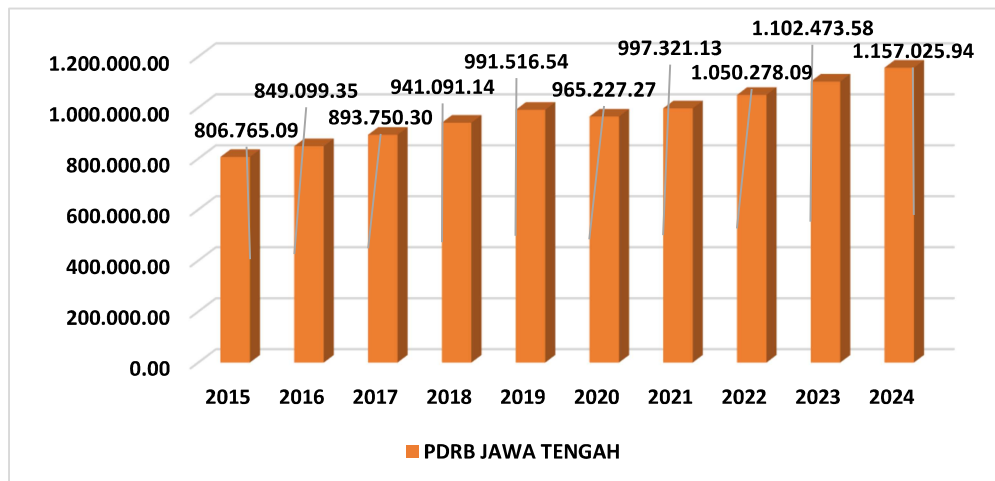
Pembangunan diartikan sebagai suatu proses yang bersifat multidimensi, dimana berlangsung perubahan mendasar pada struktur sosial, pola perilaku masyarakat, serta efektivitas kinerja lembaga-lembaga negara. Proses tersebut juga berfungsi mendorong peningkatan aktivitas perekonomian, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta menurunkan tingkat kemiskinan, sehingga mampu menghasilkan perbaikan yang lebih komprehensif terhadap tatanan sosial dan kualitas hidup masyarakat (Todaro, 2012). Pembangunan ekonomi dipahami sebagai suatu proses yang diarahkan untuk meningkatkan kondisi perekonomian yang masih berada pada tahap kurang berkembang melalui optimalisasi investasi modal dan partisipasi aktif masyarakat, karena berfungsi memastikan tercapainya berbagai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Anggriani *et al.*, 2025).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran utama dalam aktivitas perekonomian, karena mencerminkan perubahan keseluruhan output barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam rentang waktu tertentu (Syaputra *et al.*, 2024). Pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan oleh kecepatan peningkatan aktivitas ekonomi yang dipengaruhi kebijakan ekonomi yang diterapkan. Kinerja tersebut dinilai melalui indikator utama berupa peningkatan laju pertumbuhan, pergeseran struktur ekonomi ke arah yang lebih baik, serta berkurangnya ketimpangan pendapatan antarindividu, antarsektor, maupun antardaerah (Oktavia & Zulvia, 2023).

Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian Indonesia dengan kontribusi terbesar terhadap aktivitas ekonomi nasional. Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa

Tengah termasuk provinsi dengan nilai PDRB tertinggi di Pulau Jawa. Pada tahun 2024, PDRB Jawa Tengah tercatat sebesar Rp1.157,03 triliun, masih berada di bawah Jawa Timur Rp2.780 triliun, Jawa Barat. Rp2.020 triliun, dan DKI Jakarta Rp2.151 triliun. Meskipun didukung oleh jumlah penduduk yang besar dan aktivitas ekonomi yang berkembang, potensi ekonomi Jawa Tengah belum sepenuhnya tercermin dalam output yang dihasilkan.

Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/Kota dengan karakteristik ekonomi, fiskal, ketenagakerjaan, dan demografi yang beragam, serta struktur ekonomi yang ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan jasa.



Gambar 1.1 Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah 2025)

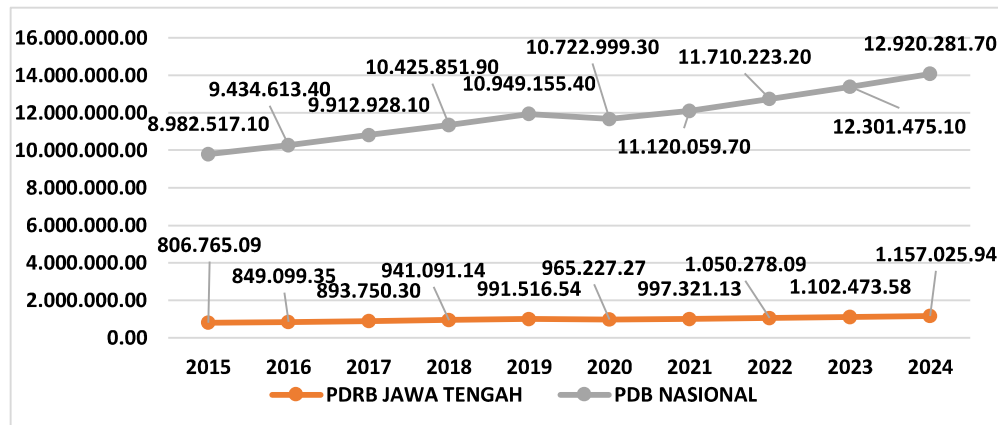
Berdasarkan data BPS, PDRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan tren peningkatan stabil selama periode 2015-2024, dari Rp806.765,09 miliar menjadi Rp1.157.025,94 miliar, meskipun sempat mengalami perlambatan pada 2020 akibat pandemi COVID-19 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi PDRB sebesar 8,25 persen terhadap PDB Indonesia

dan 14,48 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa pada tahun 2024. Namun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, ketergantungan fiskal, belum optimalnya efektivitas belanja modal, serta terbatasnya produktivitas tenaga kerja. Ketimpangan tersebut tercermin dari konsentrasi PDRB tahun 2024 pada wilayah perkotaan dan industri, seperti Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kudus, sementara beberapa daerah di wilayah selatan dan pegunungan masih memiliki kapasitas ekonomi yang relatif rendah. Selain itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah yang diukur melalui Gini Ratio tercatat sebesar 0,364 pada September 2024, dengan ketimpangan di wilayah perkotaan (0,392) lebih tinggi dibandingkan perdesaan (0,317) (BPS, 2025).

Rendahnya kemandirian fiskal, belum optimalnya efektivitas belanja modal, serta tingginya TPAK yang belum sepenuhnya diikuti peningkatan produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya perbedaan karakteristik ekonomi antarKabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga provinsi ini relevan sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis pengaruh PAD, Belanja Modal, TPAK, dan Jumlah Penduduk terhadap PDRB. Pemerintah daerah perlu mengelola keuangan secara efektif dan efisien melalui optimalisasi pendapatan, pengelolaan belanja yang terarah, serta pengendalian investasi guna memaksimalkan kontribusi terhadap perekonomian (Haryati *et al.*, 2025). Peran kebijakan fiskal di tingkat daerah tidak hanya terbatas pada pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai penggerak integrasi ekonomi melalui kerja sama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Syuhada *et al.*, 2023).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi (Maitulung *et al.*, 2023). Hal ini karena indikator tersebut mencerminkan aktivitas dan hasil produksi masyarakat dalam periode tertentu. Selain itu, PDRB juga digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu wilayah (Anggriani *et al.*, 2025).



Gambar 1.2 Pertumbuhan PDB dan PDRB Jawa Tengah Menurut Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)

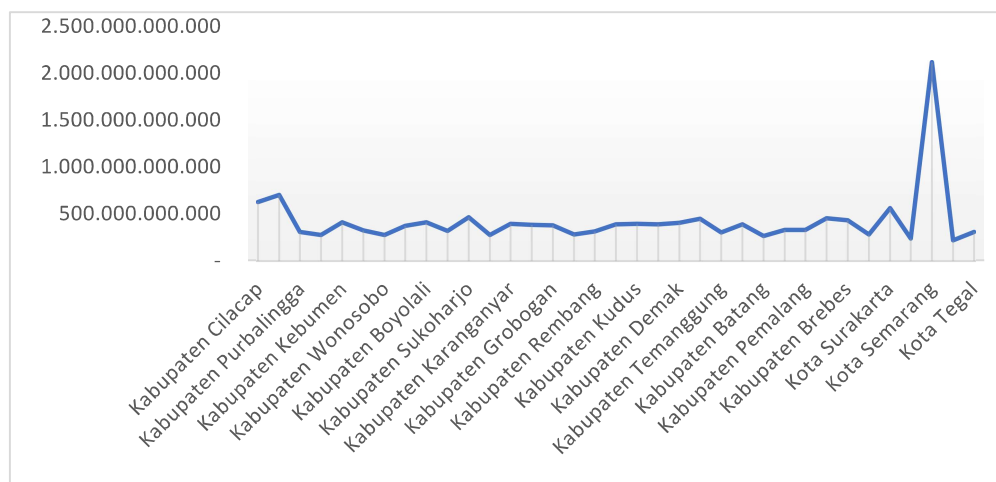
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah 2025)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perbandingan antara PDRB Jawa Tengah dan PDB Nasional menunjukkan posisi penting Jawa Tengah dalam perekonomian Indonesia. Meskipun nilai PDRB Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp1.157,03 triliun masih berada di bawah Jawa Timur dan Jawa Barat, provinsi ini tetap menjadi salah satu kontributor utama perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 8,25 persen terhadap PDB Indonesia dan 14,48 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa. Didukung oleh jumlah penduduk yang besar, struktur ekonomi yang beragam, serta karakteristik yang berbeda pada 35 Kabupaten/Kota, Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi yang signifikan.

Meskipun PDRB Jawa Tengah terus meningkat, berbagai tantangan fiskal, ketenagakerjaan, dan demografi masih memengaruhi kinerja ekonominya. Kondisi tersebut menjadikan Jawa Tengah relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang

memengaruhi PDRB sebagai indikator kinerja ekonomi daerah. Peningkatan PDRB belum sepenuhnya diikuti oleh kemandirian fiskal daerah karena masih tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat Rahmawati & Yuliana (2022)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian fiskal sekaligus sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB melalui penyediaan infrastruktur serta layanan publik. Namun, kontribusi PAD di Provinsi Jawa Tengah masih relatif rendah sehingga perannya dalam pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi belum optimal (Pasaribu & Ariani, 2023).



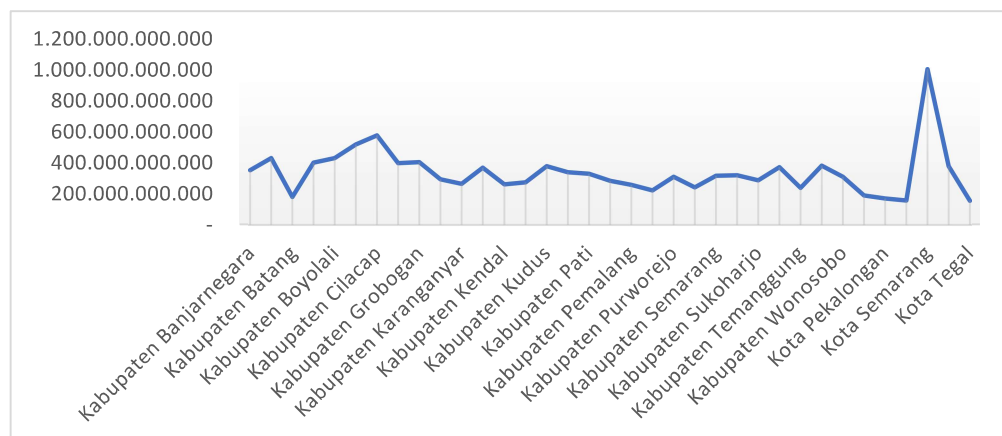
Gambar 1.3 Perkembangan Rata-rata PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024 (Rupiah)

Sumber : Kementerian Keuangan (diolah 2025)

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2024, terlihat bahwa PAD mengalami kecenderungan peningkatan hampir setiap tahun meskipun disertai variasi dalam tingkat pertumbuhannya. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2024 dan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp10.904.825.812.504. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat, sumbangannya pada pendapatan daerah serta

PDRB belum optimal, sehingga Jawa Tengah tetap bergantung pada dukungan fiskal pemerintah pusat. Perbedaan pertumbuhan PAD dan PDRB juga menunjukkan bahwa PAD belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Menurut konsep *fiscal federalism*, desentralisasi fiskal meningkatkan kemandirian daerah melalui pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD dan PDRB. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian (Gulo, 2022) Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB, sedangkan belanja modal memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. (Kirana & Susilo, 2024) Dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi neo klasik yang dikemukakan oleh Solow (1956), Peningkatan PDRB suatu daerah dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, serta kemajuan teknologi yang berkembang seiring waktu.



Gambar 1.4 Perkembangan Rata-rata Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024 (Rupiah)

Sumber : Kementerian Keuangan (diolah 2025)

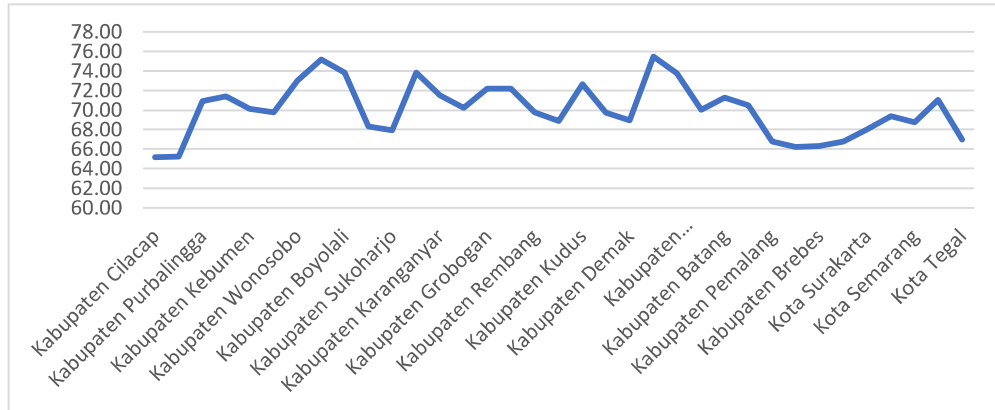
Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan aset atau infrastruktur seperti jalan, jembatan,

sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Pengeluaran ini berperan sebagai bentuk investasi pemerintah yang bertujuan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Sabilla & Sumarsono, 2022). Menurut Teori Pertumbuhan Endogen, belanja modal pemerintah berperan sebagai investasi publik yang meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi melalui pembangunan infrastruktur, sehingga mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkelanjutan.

Belanja modal pemerintah daerah merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Teori Pertumbuhan Endogen, mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi melalui pembangunan infrastruktur, sehingga mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut sejalan dengan Penelitian (Zulvan & Purbasari, 2024) hasil menyebutkan Belanja Modal berdampak positif serta signifikan terhadap pertumbuhan PDRB.

Faktor lain yang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK mencerminkan besarnya potensi tenaga kerja yang tersedia untuk mendukung aktivitas produksi di suatu wilayah. Tingginya TPAK mengindikasikan semakin banyak penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga berpotensi meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan TPAK menunjukkan

semakin banyak individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, sehingga berpotensi meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa (Pasaribu & Ariani, 2023).



Gambar 1.5 Perkembangan Rata-rata TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024 (Persen)

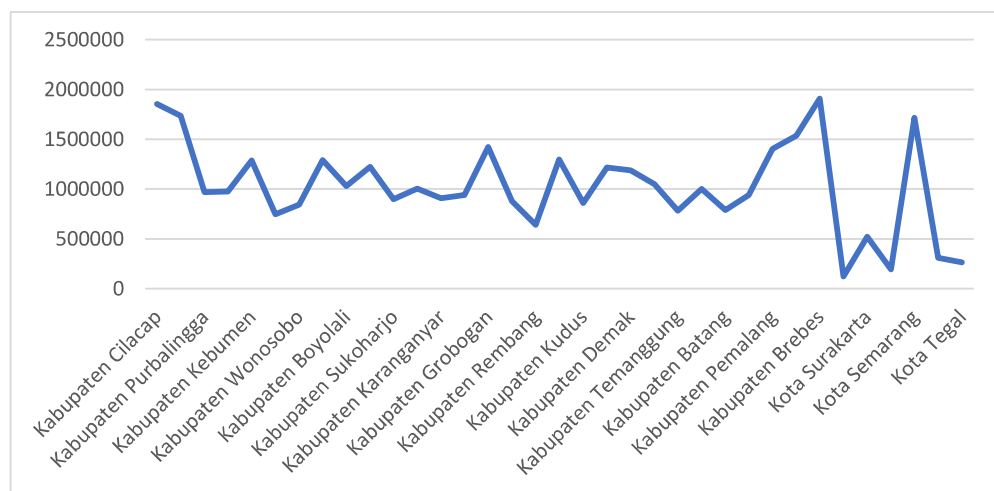
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah 2025)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencerminkan besarnya proporsi penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai pencari kerja. TPAK yang tinggi menunjukkan potensi peningkatan kapasitas produksi daerah, namun kondisi tersebut perlu didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai agar mampu bersaing dalam pasar kerja yang semakin dinamis (Safrina & Ratna, 2023).

Menurut *Human Capital Theory* yang dikemukakan oleh (Becker, 1964), tenaga kerja merupakan modal manusia yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. TPAK mencerminkan keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi sehingga berpotensi meningkatkan kapasitas produksi dan PDRB. Namun, dampaknya dapat terbatas apabila tenaga kerja masih terkonsentrasi pada sektor berproduktivitas rendah atau menghadapi keterbatasan kesempatan kerja.

Tingginya TPAK belum tentu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila tidak didukung oleh produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang memadai. Dalam *Human Capital Theory*, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menentukan kontribusi tenaga kerja terhadap peningkatan PDRB melalui proses produksi yang lebih efisien. Hasil penelitian Safrina & Ratna, (2023) juga menegaskan bahwa kenaikan partisipasi tenaga kerja cenderung diikuti oleh peningkatan PDRB.

Selain faktor fiskal dan ketenagakerjaan, jumlah penduduk juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya jumlah penduduk mencerminkan potensi pasar dan ketersediaan tenaga kerja yang dapat mendorong peningkatan permintaan serta aktivitas produksi. Di Jawa Tengah, pertumbuhan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan PDRB melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan perluasan kegiatan ekonomi.



Gambar 1.6 Perkembangan Rata-rata Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024 (Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah 2025)

Peningkatan jumlah penduduk Jawa Tengah selama 2015-2024 menunjukkan dinamika demografis yang berkaitan erat dengan kinerja PDRB, di

mana pertumbuhan penduduk berpotensi mendorong ekonomi melalui perluasan tenaga kerja dan pasar, namun juga dapat menjadi permasalahan apabila tidak diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja. Kondisi tersebut berisiko menekan PDRB per kapita, meningkatkan pengangguran, serta menambah beban infrastruktur dan pelayanan publik, sehingga pertumbuhan penduduk tidak hanya menjadi peluang peningkatan PDRB, tetapi juga tantangan struktural bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah (Liow et al., 2022).

Dalam perspektif Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith, jumlah penduduk memengaruhi PDRB karena berfungsi sebagai sumber tenaga kerja sekaligus basis pasar. Bertambahnya penduduk meningkatkan kapasitas produksi melalui ketersediaan tenaga kerja, sekaligus memperluas pasar domestik yang mendorong pembagian kerja dan spesialisasi. Proses ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga menghasilkan kenaikan output dan nilai tambah yang tercermin pada peningkatan PDRB.

Namun, peningkatan jumlah penduduk tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai, maka jumlah penduduk justru dapat menjadi beban pembangunan (Tumaleno et al., 2022). Kondisi ini menjadikan jumlah penduduk relevan untuk dianalisis bersama Pendapatan Asli Daerah, belanja modal, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tercermin dari perbedaan kapasitas fiskal, struktur demografi, produktivitas, serta kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi. Jumlah penduduk yang besar belum sepenuhnya menjadi modal pembangunan karena tidak diimbangi dengan kualitas dan daya serap ekonomi yang memadai, sehingga berpotensi menekan PDRB. Selain itu, PAD belum optimal sebagai pendorong aktivitas ekonomi, belanja modal belum merata dampaknya, dan tingginya TPAK belum diikuti peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara jumlah penduduk dengan efektivitas PAD, belanja modal, dan TPAK dalam memengaruhi PDRB, sehingga diperlukan analisis komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Jawa Tengah dipilih karena merupakan provinsi dengan kontribusi ekonomi besar di Pulau Jawa, tetapi masih menghadapi ketimpangan kapasitas fiskal, perbedaan produktivitas tenaga kerja, dan variasi jumlah penduduk antarkabupaten/kota yang cukup tinggi. Kondisi ini memungkinkan analisis pengaruh PAD, Belanja Modal, TPAK, dan Jumlah Penduduk terhadap PDRB dilakukan secara lebih komprehensif menggunakan pendekatan data panel.

Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada pengaruh PAD terhadap PDRB secara parsial, sehingga keterkaitan antara aspek fiskal, ketenagakerjaan, dan demografi belum banyak dikaji secara komprehensif. Berdasarkan Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo klasik Solow, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal dan tenaga kerja. Dalam konteks penelitian ini, PAD dan belanja modal merepresentasikan faktor modal, sedangkan TPAK dan jumlah penduduk

merepresentasikan faktor tenaga kerja. Oleh karena itu, Teori Solow digunakan sebagai landasan utama dalam menganalisis pengaruh keempat variabel tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Pada penelitian terdahulu, Penelitian yang dilakukan (Novita & Samsuddin, 2024) Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu, jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hasil penelitian sebelumnya yang meneliti tentang PDRB adalah (Rajab & Muchtar, 2023) Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan belanja modal (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam penelitian (Sabilla & Sumarsono, 2022) juga melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa Belanja pemerintah memiliki hubungan signifikan dan positif terhadap PDRB.

Optimalisasi PAD, Belanja Modal, TPAK, dan Jumlah Penduduk dalam mendorong pertumbuhan PDRB masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Perbedaan karakteristik wilayah dan kondisi demografis menyebabkan variasi kapasitas fiskal, ketersediaan tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi antar daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh faktor fiskal, ketenagakerjaan, dan demografi terhadap PDRB masih perlu dikaji secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variabel, metode, dan periode penelitian yang lebih mutakhir untuk menghasilkan temuan empiris yang dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu umumnya masih mengkaji pengaruh PAD dan belanja modal terhadap PDRB secara parsial, sementara integrasi TPAK dan jumlah penduduk masih terbatas. Selain itu, fokus penelitian yang dominan pada tingkat nasional atau provinsi menyebabkan bukti empiris di tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah masih minim. Oleh karena itu, diperlukan analisis simultan PAD, belanja modal, TPAK, dan jumlah penduduk menggunakan data panel untuk menjelaskan variasi PDRB antarwilayah.

Alasan pemilihan variabel terhadap penelitian berjudul ***“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Jumlah Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024”*** Pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan teoritis dan empiris bahwa PAD, Belanja Modal, TPAK, dan Jumlah Penduduk berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PAD dan Belanja Modal merepresentasikan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan penyediaan infrastruktur, sedangkan TPAK dan Jumlah Penduduk mencerminkan ketersediaan tenaga kerja, potensi pasar, dan permintaan agregat yang memengaruhi tingkat produksi daerah. Oleh karena itu, keempat variabel tersebut digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh faktor fiskal, ketenagakerjaan, dan demografi terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota berpotensi memengaruhi tingkat PDRB melalui variasi struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, aktivitas produksi, dan ketersediaan infrastruktur. Kota umumnya memiliki produktivitas yang lebih tinggi karena didukung sektor perdagangan, jasa, dan

industri, sedangkan kabupaten cenderung bertumpu pada sektor primer. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh PAD, Belanja Modal, TPAK, dan Jumlah Penduduk terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan, sehingga identifikasi masalah yang berkaitan dengan judul yang penulis kemukakan, adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024?
3. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024?
4. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara

simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, hasil studi ini ditujukan untuk memberikan nilai guna bagi sejumlah pihak, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas kajian dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Studi ini diharapkan dapat menjadi literatur empiris dalam pengembangan teori mengenai peran Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), serta jumlah penduduk dalam mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi literatur akademik sebagai referensi bagi studi selanjutnya yang mengkaji interaksi antara kebijakan fiskal daerah, dinamika demografi, dan kinerja ekonomi regional.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif melalui optimalisasi PAD, peningkatan belanja modal, penguatan tenaga kerja, serta pengelolaan jumlah penduduk yang produktif. Selain itu, hasilnya dapat menjadi referensi akademik dan meningkatkan pemahaman masyarakat serta sektor swasta tentang pentingnya sinergi kebijakan fiskal, kependudukan, dan aktivitas ekonomi dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.